

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan tujuan pemerintahan, maka pemerintah menempuh langkah dengan melaksanakan pembangunan disemua sektor. Dengan adanya program pembangunan ini pemerintah akan banyak membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Dalam hal ini, untuk mempercepat proses pembangunan Indonesia sangat memerlukan dana yang cukup besar untuk membangun perekonomian yang merata dan sejahtera bagi rakyatnya (Wilda & Renata, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang panjang, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan potensi maritim yang sangat besar, sektor kelautan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan menyumbang lebih dari 20% dari total pendapatan negara setiap tahunnya. Potensi besar ini perlu dikelola dengan baik melalui berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan sektor maritim, salah satunya adalah pengelolaan jasa keagenan kapal sebagai komponen penting dalam rantai logistik maritim. Sektor kelautan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian negara. Keberadaan perusahaan keagenan kapal menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sektor maritim di Indonesia.

Keagenan kapal adalah salah satu sektor jasa di bidang maritim yang memiliki peran vital dalam mendukung kelancaran operasional pelayaran dan pengelolaan pelabuhan. Keberadaan perusahaan keagenan kapal bertujuan untuk memberikan layanan administratif dan operasional bagi kapal yang berlabuh di pelabuhan, termasuk pengurusan dokumen, pembayaran biaya pelabuhan, dan

pemenuhan kewajiban terkait lainnya. Salah satu kewajiban utama perusahaan keagenan kapal adalah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan, termasuk penerimaan dari sektor kelautan dan perikanan, jasa pelabuhan, serta jasa keagenan kapal.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, terutama untuk mendukung pengelolaan sektor maritim. Di sektor keagenan kapal, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi berbagai jenis pembayaran seperti biaya labuh, biaya pandu, biaya tambat, dan biaya pelayanan lainnya. Pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor ini untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, peningkatan layanan navigasi, dan pengawasan keselamatan pelayaran. Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah strategis dengan potensi maritim yang besar. Selatpanjang, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Meranti, memiliki pelabuhan yang cukup aktif dalam melayani aktivitas pelayaran domestik maupun internasional. Berdasarkan data dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang (2024), terdapat lebih dari 50 perusahaan keagenan kapal yang beroperasi di wilayah ini, dengan 21 perusahaan di antaranya secara aktif melakukan pembayaran PNBP setiap bulannya. Salah satu perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan PNBP di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah PT Indotama Laut Lestari. Daftar perusahaan keagenan kapal dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Keagenan Kapal

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	PT Snepac Shipping	JL. Lintas Timur No.25A, Selatpanjang
2	PT Khalifah Inti Samudera	JL. Pembangunan,Desa Tanjung Samak,Kec. Rangsang
3	PT Indotama Laut Lestari	JL. Alah Cik Puan No.36, Selatpanjang
4	PT Essa Indah Timber	Tebing Tinggi, Selatpanjang
5	PT Mafase Utama Sakti	JL. Jawi-Jawi No.58, Selatpanjang
6	PT Meranti Kargo Mandiri	JL. Pelabuhan,No.18 Selatpanjang

No	Nama Perusahaan	Alamat
7	PT Syazya Putri Shipping	JL. Suak Baru,Gg.Hj Moh.Thib,Selatpanjang
8	PT Nuda Lautan Bahira	JL. Pelabuhan, Selatpanjang
9	PT Morgan Murphy Agency	JL. Imam Bonjol, Selatpanjang Barat
10	PT Citra Gading Lestari	JL. Tebing Tinggi,No.46 Selatpanjang
11	PT Putri Riau Sejati	JL. Tebing Tinggi,No.46 Selatpanjang
12	PT Mitra Amertha Agency	JL. Tebing Tinggi,No.131A Selatpanjang
13	PT Mediatama Nusantara Shipping	JL. Lintas Timur No.25A, Selatpanjang
14	PT Menara Layar Mas	JL. Lintas Timur No.25A, Selatpanjang
15	PT Jaya Utama	JL. Jawi-Jawi No.58, Selatpanjang
16	PT Tenaga Intan Perkasa	JL. Lintas Timur No.25A, Selatpanjang
17	PT Adimas Bahtera Samudera	JL. Pahlawan No.35, Selatpanjang Kota
18	PT Selat Malaka Bahari	JL. Diponegoro, Selatpanjang
19	PT Indomas Karya Nusantara	JL. Pelabuhan No.18, Selatpanjang
20	PT Dinamika Mitra Samudera	JL. Alah Cik Puan No.36, Selatpanjang
21	PT Titony Rezeki Niaga Makmur	JL. Alah Cik Puan No.36, Selatpanjang

Sumber : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang (2025)

PT Indotama Laut Lestari merupakan perusahaan keagenan kapal yang berdiri sejak tahun 2020 dan telah beroperasi secara aktif di Selatpanjang. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan bagi kapal yang berlabuh di pelabuhan Selatpanjang, termasuk pengurusan dokumen pelabuhan, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pelayanan logistik lainnya. Sejak awal berdirinya, PT Indotama Laut Lestari berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor keagenan kapal. Berdasarkan data internal perusahaan, kontribusi PT Indotama Laut Lestari terhadap PNBP mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya jumlah kapal yang dilayani. Namun, untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan operasional ini, perusahaan juga harus memenuhi kewajiban dalam membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini meliputi berbagai jenis pendapatan seperti penerimaan dari jasa, pendapatan yang berasal dari penggunaan sumber daya alam, dan penerimaan dari penggunaan kekayaan negara lainnya. Dalam sektor keagenan kapal, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa kemaritiman diharuskan untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

kepada pemerintah atas jasa-jasa yang diberikan terkait aktivitas keagenan kapal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, yang menyebutkan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi jasa transportasi darat, jasa transportasi perkeretaapian, jasa transportasi laut, jasa transportasi udara, jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana dan denda administratif.

Dalam konteks keagenan kapal, PNBP diperoleh dari pembayaran biaya-biaya terkait pelayanan jasa kepada kapal, seperti biaya labuh, biaya tambat, biaya pandu, dan biaya lainnya yang dikenakan oleh pelabuhan. Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai memfasilitasi pembayaran penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan non anggaran mengeluarkan Sistem informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online yang disebut SIMPONI. Sistem tersebut merupakan sistem Billing yang dikelola oleh Direktorat Jendral Anggaran (DJA) untuk Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai upaya mewujudkan Good Governance terus dilakukan, salah satu upaya yang direncanakan dan telah ter realisasikan adalah melakukan interkoneksi antara aplikasi SINKARKES dan INAPORTNET dengan SIMPONI dalam penerbitan Billing pembayaran dokumen kesehatan dan kedatangan ataupun keberangkatan kapal. Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) adalah media pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi informasi yang membantu kegiatan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan dikantor kesehatan pelabuhan dan saling terkoneksi antar kantor kesehatan pelabuhan diseluruh Indonesia. Dalam pengurusan penerbitan izin karantina dibebankan dalam bentuk PNBP. (Yohanes,2024).

Untuk menunjang fasilitas pelabuhan yang baik, maka dibuat suatu sistem pelayanan kapal berbasis online. Permohonan Surat Permohonan Berlayar (SPB) dapat diajukan secara online dengan menggunakan sistem INAPORTNET. Plt Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha (2021) mengatakan salah satu upaya untuk

meningkatkan kinerja pelabuhan adalah dari sisi soft infrastruktur dengan mengimplementasikan INAPORTNET. INAPORTNET merupakan layanan berbasis internet yang berpusat dengan standar pelayanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang di pelabuhan. Dengan adanya sistem INAPORTNET diharapkan ada peningkatan dalam pelayanan kapal dan barang di pelabuhan sehingga bisa berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan terstandarisasi. Berdasarkan uraian pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui INAPORTNET, Sistem layanan INAPORTNET (Indonesia Portnet) yang juga dikenal dengan Sistem Layanan Kepelabuhan Secara Elektronik merupakan sistem layanan tunggal untuk Kapal dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Kapal yang diterapkan secara elektronik dan terstandar (Puriningsih, 2016).

Dalam menjalankan operasional sehari-hari, PT Indotama Laut Lestari memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran ini tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan dan penerimaan negara. Di sisi lain, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh perusahaan juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya di sektor keagenan kapal. Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering kali menghadapi tantangan dalam proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi termasuk kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang berlaku, kesulitan dalam proses administrasi, dan masalah *cash flow* yang berdampak pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (Putro & Wijaya, 2018). Hal ini menjadi perhatian penting yang perlu dianalisis lebih mendalam, karena dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Dari perspektif daerah, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh PT Indotama Laut Lestari tidak hanya berdampak pada penerimaan negara tetapi juga pada pembangunan daerah. Pendapatan yang

dikumpulkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, penting untuk memahami seberapa besar kontribusi dari perusahaan ini terhadap pendapatan daerah serta dampaknya bagi masyarakat setempat. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang diakui memiliki sumber daya alam yang melimpah, sektor keagenan kapal tidak hanya memfasilitasi transportasi barang dan orang, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Melalui kegiatan keagenan kapal, perusahaan dapat memberikan layanan yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam distribusi barang. Namun, untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan operasional ini, perusahaan juga harus memenuhi kewajiban dalam membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi dan strategi yang tepat bagi pemerintah dalam mengoptimalkan kontribusi sektor keagenan kapal terhadap penerimaan PNBP dan pengembangan ekonomi maritim di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak PT Indotama Laut Lestari Di Kabupaten Kepulauan Meranti”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi PT Indotama Laut Lestari pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja unsur yang menyebabkan besaran kontribusi PT Indotama Laut Lestari pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kapal di Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimana strategi PT Indotama Laut Lestari dalam meningkatkan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta berdasarkan proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan membahas masalah terkait kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT Indotama Laut Lestari di Kabupaten Kepulauan Meranti dimulai dari tahun 2020-2023

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu sasaran sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi PT Indotama Laut Lestari dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengidentifikasi unsur yang menyebabkan besaran kontribusi PT Indotama Laut Lestari dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Untuk mengetahui langkah yang diambil oleh PT Indotama Laut Lestari dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi media pembelajaran secara nyata oleh peneliti dan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang kontribusi perusahaan keagenan kapal dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor maritim.

- b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan dukungan serta manfaat lebih di lapangan terhadap teori-teori terkait masalah penelitian yang akan memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Kontribusi Perusahaan di sektor keagenan kapal terhadap pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kabupaten Kepulauan Meranti,serta diharapkan bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi PT Indotama Laut Lestari

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang kontribusi perusahaan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan perusahaan dalam membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengoptimalkan kontribusi sektor keagenan kapal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengembangan ekonomi maritim di Kabupaten Kepulauan Meranti.

c) Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian Analisis Kontribusi PT Indotama Laut Lestari pada Sektor Keagenan Kapal dalam Melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Studi kasus pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan suatu penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka membahas tentang penelitian terdahulu dan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan masalah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Pada metodologi penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN